

KERAGAAN LEMBAGA KEUANGAN DI KECAMATAN PANGALENGAN, KABUPATEN BANDUNG

THE PERFORMANCE OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN PANGALENGAN SUBDISTRICT, BANDUNG DISTRICT

Annida Aisah*, Eliana Wulandari

Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

*E-mail: annidaaisah20@gmail.com

(Diterima 27-12-2019; Disetujui 16-01-2019)

ABSTRAK

Kecamatan Pangalengan merupakan salah satu sentra produksi kentang terbesar di Jawa Barat. Kurangnya modal yang dimiliki petani dan tidak menentunya hasil panen serta harga input produksi yang sangat tinggi menyebabkan petani memerlukan pembiayaan dari lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Sektor pertanian merupakan sektor yang berisiko tinggi, sehingga lembaga keuangan terutama bank kurang tertarik untuk membiayai usaha pertanian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sulitnya akses petani terhadap lembaga keuangan disebabkan oleh persyaratan-persyaratan yang belum sesuai dengan kemampuan beberapa petani di Kecamatan Pangalengan.

Kata kunci: Lembaga keuangan, Petani, Kecamatan Pangalengan

ABSTRACT

Pangalengan Sub District is one of the largest potato production centers in West Java. Lack of capital of farmers, uncertain yields and very high production input prices cause farmers need to access credit from financial institutions, both bank and non-bank financial institutions. Agriculture sector is a high-risk sector, financial institutions especially banks are less interested in financing the agricultural business. This research applies descriptive analysis using primary and secondary data. The results showed that the difficulty of farmers' access to financial institutions was due to requirements that could not be fulfilled by some farmers in Pangalengan Sub District.

Keywords: Financial institutions, Farmers, Pangalengan Sub District

PENDAHULUAN

Kecamatan Pangalengan merupakan salah satu sentra produksi kentang terbesar di Jawa Barat. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, para petani hortikultura di Pangalengan mengeluh karena harga input produksi yang meningkat sedangkan modal yang dimiliki petani sedikit dan hasil panen

yang tidak menentu, sehingga para petani memerlukan kredit dari lembaga keuangan sebagai bantuan modal usahanya¹⁾.

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari

masyarakat (Pasal 1 Ayat 2 Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Keuangan). Menurut Geminastiti dan Nurlita (2016), lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan Keppres No.61 Tahun 1988 Pasal 2 Ayat 1, Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha: (a) Sewa Guna Usaha, (b) Modal Ventura, (c) Perdagangan Surat Berharga, (d) Anjak Piutang, (e) Usaha Kartu Kredit, dan (f) Pembiayaan Konsumen. Adapun jenis bank menurut fungsinya terbagi menjadi dua yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, sedangkan berdasarkan kegiatan usahanya, bank terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah (Geminastiti dan Nella, 2016).

Lembaga keuangan non bank merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung dalam

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (Nurhadi, 2013). Adapun fungsi dari lembaga keuangan non bank menurut Nurhadi (2013) adalah untuk memperlancar penyaluran barang, memperbanyak lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Jenis-jenis lembaga keuangan non bank menurut Wiwoho (2014) adalah : (1) Perusahaan Asuransi, (2) Dana Pensiun, (3) Koperasi Simpan Pinjam, (4) Pasar Modal, (5) Perusahaan Anjak Piutang, (6) Perusahaan Modal Ventura, (7) Perusahaan Pegadaian, (8) Perusahaan Kartu Kredit, (9) Perusahaan Sewa Guna Usaha, (10) Pasar Uang, dan (11) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Kantor Cabang Bank Umum Berdasarkan Lokasi Bank di Indonesia (Unit)

Lokasi	2017	2018	2019
DKI Jakarta	544	528	510
Jawa Barat	413	415	412
Jawa Timur	432	430	428
Lainnya	2.319	2.336	2.347
Total	3.708	3.709	3.697

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2017 hingga 2019, perkembangan jumlah kantor cabang bank umum mengalami fluktuasi, dan di tahun 2019 jumlah kantor cabang bank umum mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya. Selama tiga tahun berturut – turut, DKI Jakarta menempati posisi

pertama dengan jumlah kantor cabang bank umum terbanyak, sedangkan Jawa Barat menempati posisi ketiga dengan jumlah kantor cabang bank umum terbanyak di Indonesia.

Tabel 2. Tabel Perkembangan Jumlah Kantor Bank di Jawa Barat Periode 2015-2017 (Unit)

Kota / Kabupaten	2015	2016	2017
Kota Bandung	866	794	773
Kabupaten Bandung	360	352	341
Kota Bekasi	401	395	385
Lainnya	3.582	3.486	3.448
Total	5.209	5.027	4.947

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, 2016-2018

Berdasarkan Tabel 2, pada tahun 2017, jumlah kantor bank di Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun 2015 dan 2016. Kota Bandung memiliki jumlah kantor bank terbanyak pertama di Jawa Barat, sedangkan Kabupaten Bandung menempati urutan ketiga setelah Kota Bekasi.

Selain lembaga keuangan bank, juga terdapat lembaga keuangan non bank yang dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan bantuan pembiayaan yaitu salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memiliki fungsi untuk melayani masyarakat terutama anggotanya dalam memenuhi keperluannya untuk menyimpan dan meminjam dana. Bank Indonesia (2001) menyatakan bahwa

dilihat dari jumlah pinjamannya, (kredit/pembiayaan yang disalurkan), posisi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam termasuk dua besar setelah BRI Unit Desa. Perkembangan jumlah koperasi di Indonesia periode 2016-2018 disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Koperasi di Indonesia Periode 2016-2018 (Unit)

Provinsi	2016	2017	2018
Jawa Tengah	25.549	21.667	13.460
Jawa Timur	31.980	27.683	24.024
Jawa Barat	25.549	16.203	11.127
Lainnya	125.117	86.621	77.732
Total	208.195	152.174	126.343

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2017-2019

Adapun perkembangan jumlah koperasi di Indonesia pada Tabel 3, dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2018 total koperasi yang berada di Jawa Barat sebanyak 24.727 unit, Koperasi Unit Desa sebanyak 627 unit, dan Koperasi Non KUD sebanyak 24.057 unit.

Menurut Renstra Kementan (2019), sektor pertanian terutama tanaman pangan memiliki kontribusi yang besar terhadap penyedia kebutuhan, penghasil devisa negara, penyedia lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari tahun 2018, pekerjaan penduduk Indonesia

terbanyak adalah di sektor pertanian. Jumlah tenaga kerja sektor pertanian dan non pertanian di Indonesia pada tahun 2016-2018 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian di Indonesia Periode 2016-2018 (Jiwa)

Sektor	2016	2017	2018
Pertanian	35.649.184	36.956.111	35.875.389
Non Pertanian	82.356.586	84.860.396	88.367.305
Total	118.005.770	121.816.507	124.242.694

Sumber: Kementerian Pertanian, 2016-2018

Berdasarkan Tabel 4, jumlah tenaga kerja sektor pertanian dan non pertanian di Indonesia periode tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini terjadi karena perkembangan jumlah penduduk di

Indonesia yang setiap tahunnya meningkat.

Dilihat dari Tabel 5, jumlah kredit yang dikucurkan bank pada periode 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, dan kredit yang terbesar yang dikucurkan adalah untuk sektor perdagangan besar dan eceran yaitu Rp. 532.134 miliar. Sedangkan untuk sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, terutama sektor pertanian, lembaga keuangan bank kurang tertarik memberikan kredit karena sektor pertanian merupakan sektor yang beresiko tinggi (Sayaka dan Rivai, 2011).

Tabel 5. Jumlah Kredit yang Dikucurkan Bank Periode 2016-2018 (Rp. Miliar)

Sektor	2016	2017	2018
Perdagangan Besar dan Eceran	463.489,3	490.234,9	532.134
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	72.603,8	84.224,1	94.274,7
Industri Pengolahan	83.719,5	95.523,9	100.281,4
Lainnya	258.081,2	281.182,8	310.929
Total	877.893,8	951.111,7	1.037.619,1

Sumber: Bank Indonesia, 2016-2018

Aksesibilitas petani dengan kepemilikan lahan yang sempit untuk mendapatkan kredit pertanian masih terbatas, padahal mayoritas masyarakat pedesaan merupakan petani-petani yang memiliki lahan sempit (Hendriyani dan Karyani, 2015). Selain itu, para petani sulit mengakses kredit ke lembaga keuangan terutama bank dikarenakan prosedurnya yang tidak sesuai dengan karakteristik petani yaitu salah satunya

adalah kepemilikan lahan yang nantinya dijadikan sebagai jaminan kepada lembaga keuangan bank (Pattern dan Rosengard, 1991). Oleh sebab itu, keragaan lembaga keuangan terutama di Kecamatan Pangalengan perlu untuk dikaji.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten

Bandung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas Kecamatan Pangalengan merupakan salah satu sentra produksi kentang dimana para petaninya masih mengalami kekurangan modal untuk usahatannya.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2019, hasil survei petani responden dengan menggunakan teknik stratified random sampling di Desa Pulosari dan Desa Pangalengan sebagai sentra produksi kentang di Kecamatan Pangalengan, dan wawancara mendalam pada tanggal 4 September 2019 sampai dengan 15 September 2019 dan data sekunder yang berasal dari data Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan dari Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar, aksesibilitas petani terhadap kredit ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi, karakteristik petani itu sendiri, usaha yang ditekuni, ketersediaan informasi serta karakteristik

dari kredit yang akan diakses (Azriani, 2014). Dalam memberikan kredit, bank memiliki kriteria khusus dalam memilih nasabah. Beberapa unsur yang digunakan oleh bank menurut Kasmir (2004) adalah (1) *Character* yaitu karakter nasabah yang mengajukan kredit, (2) *Capacity* yaitu kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya, (3) *Capital* yaitu modal yang dimiliki nasabah, (4) *Collateral* yaitu jenis barang yang akan dijadikan jaminan oleh nasabah, dan (5) *Condition of Economy* yaitu kondisi ekonomi usaha yang dibiayai.

Tabel 6. Jumlah Penduduk di Kecamatan Pangalengan Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Belum/Tidak Pernah Sekolah	7.557	5,64
Tidak Tamat SD/Sederajat	18.819	14,03
SD/Sederajat	58.400	43,54
SLTP/Sederajat	31.008	23,11
SLTA/Sederajat	15.187	11,32
Perguruan Tinggi	3.186	2,37
Jumlah	134.157	100

Sumber: Kecamatan Pangalengan Dalam Angka, 2018

Berdasarkan Tabel 6, mayoritas penduduk Kecamatan Pangalengan berpendidikan SD/Sederajat. Dalam aksesibilitas terhadap kredit, karakteristik nasabah menjadi salah satu permasalahan yang membuat petani sulit mendapatkan akses pembiayaan atau kredit.

Karakteristik nasabah tersebut salah satunya dilihat dari tingkat pendidikan. Rata-rata penduduk di Kecamatan Pangalengan adalah SD/Sederajat. Pendidikan petani yang relatif tinggi akan berpengaruh pada daya nalar yang akan menyebabkan petani berpikir secara dinamis, sedangkan petani dengan pendidikan rendah akan berpikir secara statis dalam pengambilan keputusan (Tomy, 2013). Adapun pekerjaan utama penduduk Kecamatan Pangalengan disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah Penduduk di Kecamatan Pangalengan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Petani Tanaman	7.592	12,88
Buruh Tani	21.499	36,45
Perdagangan	8.354	14,16
Lainnya	21.537	36,51
Total	58.982	100

Sumber: Kecamatan Pangalengan Dalam Angka, 2018

Menurut Kecamatan Pangalengan Dalam Angka Tahun 2018, mayoritas pekerjaan penduduk Kecamatan Pangalengan yang disajikan pada Tabel 7 yaitu buruh tani. Padahal, dalam mendapatkan kredit, jaminan dan kondisi ekonomi usaha yang akan diajukan kredit sangat mempengaruhi. Buruh tani di Kecamatan Pangalengan rata-rata mendapatkan penghasilan yang relatif

rendah yaitu sekitar Rp. 25.000,- untuk buruh tani wanita dan Rp. 35.000,- untuk buruh tani laki – laki untuk jam kerja dari pukul 07.00-12.00 WIB, sedangkan apabila buruh tani bekerja sampai pukul 15.00 WIB, maka buruh tani akan mendapatkan upah tambahan. Adapun usaha pertanian merupakan usaha yang risikonya sangat tinggi, dan hasil penjualannya tidak menentu.

Tabel 8. Rata-Rata Kepemilikan Lahan Pertanian di Kecamatan Pangalengan

Luas Lahan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Tidak memiliki lahan	1.999	63,66
0 – 0,5 Ha	1.113	35,44
0,51 – 1,0 Ha	28	0,90
> 1,0 Ha	0	0
Total	3.140	100

Sumber: Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian BPP Pangalengan, 2019

Berdasarkan Tabel 8, petani di Kecamatan Pangalengan banyak yang tidak memiliki lahan, adapun yang memiliki lahan paling banyak sekitar 0-0,5 Ha dimana menurut Bappenas (2001) artinya petani Kecamatan Pangalengan masuk ke dalam kategori petani skala kecil. Tidak memiliki lahan pertanian merupakan salah satu kendala bagi para petani Pangalengan, karena petani harus membayar sewa lahan dengan harga yang cukup tinggi dengan pendapatan yang seadanya, dan untuk mengakses kredit ke bank pun mereka jadi terhambat karena tidak memiliki jaminan berupa sertifikat

tanah yang dapat mereka jaminkan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan modal berupa kredit dengan jumlah yang lebih besar.

Tabel 9. Luas Lahan, Produktivitas, dan Nilai Produksi Komoditas Sayuran di Kecamatan Pangalengan Tahun 2018

Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Produktivitas (ton/ha)	Nilai Produksi (miliar rupiah)
Kentang	2190	20,01	328,66
Bawang Daun	229,28	38,50	220,68
Cabai	331,75	11,43	132,71
Lainnya	7.159,64	250,14	126,10
Total	9.910,67	320,08	808,15

Sumber: Profil Kecamatan Pangalengan, 2019

Kecamatan Pangalengan memiliki beraneka ragam komoditas hortikultura, seperti yang disajikan pada Tabel 9, komoditas unggulan Kecamatan Pangalengan adalah kentang. Kentang di Kecamatan Pangalengan memiliki nilai produksi sebesar Rp. 328,66 miliar, sehingga usahatani komoditas kentang perlu untuk dipertahankan. Luasnya lahan untuk komoditas kentang membuat petani harus mengeluarkan modal yang lebih besar untuk membeli input. Tidak semua petani kentang Kecamatan Pangalengan dapat dikatakan mampu karena nilai produksi kentang yang sangat tinggi, seperti yang disajikan pada Tabel 7, penduduk Kecamatan Pangalengan mayoritas merupakan buruh tani yang upah sehari – harinya relatif sedikit, sehingga mereka harus mencari modal

tambahan agar bisa membeli input produksi usaha tani kentang.

Selain mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan bank, petani juga bisa mendapatkan bantuan modal melalui kelompok tani. Kelompok tani dibentuk atas dasar surat keputusan, dimana maksud dan tujuannya adalah sebagai wadah komunikasi antar petani serta petani dengan kelembagaan terkait dalam mendapatkan alat dan mesin pertanian (Wahyuni, 2003). Gabungan kelompok tani di Kecamatan Pangalengan disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10. Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Pangalengan

Gapoktan	Alamat
Lamajang	Cikondang, Lamajang
Bakti Mulya	Lebaksaat, Tribakti
Marga Mulya	Narogtog, Margamulya
Wargi Setia	Sukamenak Kulon
Mulya Agung	Cinangsi, Pulosari
Mekar Mulya	Bakir, Margamekar
Berkah Mekar	Cipangisikan
Saluyu	Wates, Sukaluyu
Margaluyu	Puncakraya, Margaluyu
Mitra Mukti	Sukamenak Wetan
Sukamanah	Cibuntu, Sukamanah
Banjarsari	Banjarsari
Wanasuka	Wanasuka

Sumber: Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian BPP Pangalengan, 2019

Berdasarkan Tabel 10, jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan Pangalengan berjumlah tiga belas, sesuai dengan jumlah desa yang berada di Kecamatan Pangalengan. Adanya gapoktan tentu saja akan mempermudah para petani untuk

mendapatkan bantuan modal dari pemerintah, terutama berupa input produksi seperti alat dan mesin pertanian, pupuk bersubsidi, benih kentang, dan sebagainya. Pemerintah akan menyalurkan bantuannya melalui Gapoktan yang nantinya akan disebarakan lagi ke kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan tersebut.

Selain melalui gapoktan, petani juga dapat mengakses bantuan modal atau kredit ke lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Pangalengan. Adapun lembaga keuangan dan lembaga ekonomi yang dapat diakses oleh petani di Kecamatan pangalengan disajikan pada Tabel 11.

Jumlah lembaga keuangan dan lembaga ekonomi di Pangalengan pada tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, jumlah lembaga keuangan dan lembaga ekonomi di pangalengan mengalami penurunan yang sangat drastis pada koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat, koperasi simpan pinjam, dan koperasi non KUD lainnya. Tersedianya lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank diharapkan dapat membantu petani dalam mendapatkan modal tambahan untuk usaha tani kentangnya, disamping mendapatkan

bantuan input dari pemerintah tidak selalu sampai ke tangan petani.

Tabel 11. Lembaga Keuangan dan Lembaga Ekonomi di Kecamatan Pangalengan

Lembaga Keuangan	2015 (Unit)	2016 (Unit)	2017 (Unit)
Bank Umum	7	9	9
Lembaga Keuangan Non Bank	1	2	2
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	2	4	4
ATM	3	3	4
Koperasi Unit Desa (KUD)	1	1	1
Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa)	11	7	7
Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)	4	1	1
Koperasi non KUD lainnya	15	11	23
Total	44	38	51

Sumber: Kecamatan Pangalengan dalam Angka, 2016-2018

Selain akses terhadap lembaga keuangan bank, petani juga dapat mengakses bantuan modal ke lembaga keuangan non-bank yaitu pedagang/pembeli, kios sarana pertanian, dan kerabat/saudara/tetangga, dan sebagainya. Akses petani Kecamatan Pangalengan terhadap lembaga keuangan pada tahun 2018 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Akses Petani Terhadap Lembaga Keuangan Tahun 2018

Lembaga Keuangan	Orang
Bank komersil	9
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	10
Pemerintah/koperasi/kelompok tani	2
Pedagang/pembeli	4
Kios sarana pertanian	18
Kerabat/saudara/tetangga	9
Total	52

Sumber: Data primer, 2019 (Diolah)

Pada tahun 2018, petani di Kecamatan Pangalengan mayoritas mengakses bantuan modal ke kios sarana pertanian. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, alasan petani mengakses bantuan modal ke kios sarana pertanian adalah tidak ada persyaratan dan bunga yang tinggi, serta letaknya yang dekat dengan rumah dan kebun petani sehingga mudah untuk diakses. Pemberian bantuan modal berupa input hanya didasarkan atas kepercayaan dan hubungan pribadi antara pemilik kios dengan petani yang mengakses modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam mendapatkan bantuan dari lembaga keuangan dalam bentuk kredit maupun input pertanian tidak mudah. Para petani dihadapkan dengan persyaratan-persyaratan pengajuan yang belum sesuai dengan kemampuan beberapa petani di Kecamatan Pangalengan. Adapun persyaratan yang membuat petani kesulitan mengakses ke lembaga keuangan bank adalah penyerahan agunan (jaminan) dan tingginya suku bunga yang ditentukan oleh lembaga keuangan bank.

Oleh karena itu, petani lebih memilih mengakses kredit ke bandar atau pembeli hasil panennya, meminjam uang

kepada keluarganya, meminjam obat ke toko obat maupun toko pupuk yang kemudian dibayar setelah panen. Meskipun hasil panen yang didapatkan lebih kecil jika meminjam ke bandar, tetapi petani tetap mengaksesnya karena tidak ada persyaratan tertentu untuk mengakses ke bandar. Bandar, keluarga, toko obat, dan toko pupuk memberikan pembiayaan kepada petani atas dasar kepercayaan dan hubungan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azriani Z. (2014). *Aksesibilitas dan partisipasi industri kecil dan rumah tangga pada sumber pembiayaan dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha dan kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Bogor Jawa Barat [disertasi]*. Bogor: Sekolah Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Jawa Barat Dalam Angka tahun 2016*. BPS. Kabupaten Bandung.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Jawa Barat Dalam Angka tahun 2017*. BPS. Kabupaten Bandung.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Jawa Barat Dalam Angka tahun 2018*. BPS. Kabupaten Bandung.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kecamatan Pangalengan Dalam Angka tahun 2018*. BPS. Kabupaten Bandung.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Profil Kecamatan Pangalengan Tahun 2019*. BPS. Kabupaten Bandung.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan*

- Utama 1986-2018. diakses pada 30 November 2019 melalui <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2018.html>.
- Bank Indonesia. (2019). Perkembangan Kredit UMKM September 2018. diakses pada Hari Senin, 30 Oktober 2019 melalui <https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/Pages/Data-Kredit-UMKM-September-2018--.aspx>.
- Endang & Yeyet. (2019). *Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian BPP Pangalengan, 2019*. Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- Bappenas. (2001). *Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan*.
- Geminastiti, K. & Nella N. (2016). *Ekonomi Untuk Siswa SMA/MA Kelas X*. Penerbit Yrama Widya – Bandung.
- Hendriyani, H. & Tuti Karyani. (2015). Analisis Persepsi dan Sikap Petani Terhadap Lembaga Pembiayaan Formal dan Informal (Suatu Kasus Di Gapoktan Sami Mulya Kec. Sedong, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat). *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Inklusif di Sektor Pertanian II*. Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran.
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2018). Rekapitulasi Data Koperasi per 31 Desember 2016 http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1566783223_Data%20Koperasi%20Tahun%202016.pdf. Diakses 29 Oktober 2019.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2018). Rekapitulasi Data Koperasi per 31 Desember 2017. http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1566783253_Data%20Koperasi%20Tahun%202017.pdf. Diakses 29 Oktober 2019.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2018). Rekapitulasi Data Koperasi per 31 Desember 2018 http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1566783293_Data%20Koperasi%20Tahun%202018.pdf. Diakses 29 Oktober 2019.
- Kementerian Pertanian RI. (2017). *Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Tahun 2016-2017*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian RI. (2018). *Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Tahun 2017-2018*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. (2019). *Rencana strategis direktorat jenderal tanaman pangan tahun 2015-2019*. <http://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/RENSTRA%20DITJEN%20TP%202015-2019.pdf>. Diakses 8 Desember 2019.
- Nurhadi. (2013). *Lensa Kegiatan Ekonomi SMA/Ma Kelas X*. PT. Bumi Aksara – Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Perbankan. diakses pada 1 Desember 2019 melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Statistik Perbankan Indonesia. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---September-2019/SPI%20September%202019.pdf>. Diakses 29 Oktober 2019.
- Pattern, R.H. & Rosengard, J.K. (1991). *Progress with Profits: The Development of Rural Banking in Indonesia [Working Paper]*. San Francisco (AS): International Center for Economic Growth.
- Sayaka, B., & Rivai, R. S. (2011). *Peningkatan akses petani terhadap kredit ketahanan pangan dan energi*. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Tomy, J. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usahatani jagung Di Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. *Agroland: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*, 20(1), 61-66.
- Wahyuni, S. (2003). Kinerja kelompok tani dalam sistem usaha tani padi dan metode pemberdayaannya. *Jurnal litbang pertanian*, 22(1), 1-8.
- Wiwoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87-97.